



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem penanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan indikator kinerja;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan Indikator Kinerja Utama di lingkup masing-masing dan Bupati wajib menerapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 8);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

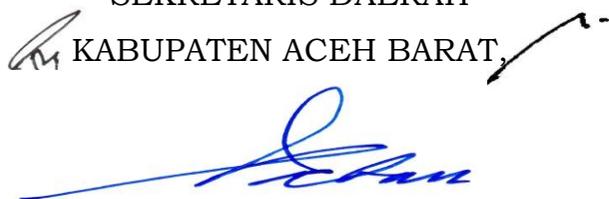
Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H


Pj. BUPATI ACEH BARAT,
MAHDI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026

1. Pemerintah : Aceh Barat.
2. Kewenangan : Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan mitigasi bencana	1	Indeks Risiko Bencana	(Bahaya X Kerentanan) Kapasitas	BPBD
		2	Jumlah kelompok masyarakat siaga bencana	Pelayanan Penanggulangan Bencana yang <u>dapat diberikan kepada Masyarakat</u> Pelayanan Penanggulangan Bencana yang dibutuhkan Masyarakat x100%	BPBD
		3	Cakupan sarana dan prasarana kebakran	<u>Jumlah sarana prasarana kebakaran yang ada</u> Jumlah sarana prasarana kebakaran yang akan dibangun X 100%	BPBD
		4	Cakupan sarana dan prasarana bencana banjir dan tsunami	Jumlah sarana dan prasarana banjir dan <u>Tsunami yang ada</u> Jumlah Target sarana prasarana bencana banjir dan tsunami yang akan Dibangun x100	BPBD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		5	Jumlah satgas kebencanaan	Jumlah SDM/Masyarakat Satgas <u>Kebencanaan yang Terbentuk</u> Jumlah Target SDM/Masyarakat Satgas Kebencanaan yang akan Terbentuk x 100%	BPBD
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Perhitungan IKLH untuk setiap Kabupaten/Kota sbb : $IKLH_{Kabupaten/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Dinas Lingkungan Hidup
		7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, transportasi, permukiman dan perkantoran menggunakan metode <i>passive sampler</i> dengan parameter yang diukur adalah SO ₂ dan NO ₂ . Pengukuran kualitas udara dilakukan sebanyak 2 kali per tahun. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar <i>European Union (EU) Directives</i> . Apabila nilai indeks > 1, berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
				<p>nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$	
		8	Indeks Kualitas air (IKA)	<p>Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (<i>Pollution Index - PI</i>).</p> <p>Rumus perhitungan indeks pencemaran adalah :</p> $P_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2_M + (C_i/L_i)^2_R}{2}}$	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
3	Mencegah pencemaran dan kerusakan SDA LH	9	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap rencana pengelolaan lingkungan (RKL) Dan rencana pemantauan lingkungan(RPL)}}{\text{jumlah usaha yang dilakukan pengawasan}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
		10	Persentase penurunan luas areal lahan yang terbakar setiap tahun	$\frac{\text{Persentase perubahan: Nilai akhir- akhir awal}}{\text{Nilai awal}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	11	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibentuk	<p>DLH tidak membentuk kelompok peduli lingkungan, tetapi itu terbentuk oleh mereka sendiri yg bergerak di bidang lingkungan hidup.</p> <p>Contoh yg sudah terbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan paramadina semesta 2. LSM gerakan peduli lingkungan 3. BUMO ENDATU CEUDAH 	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur	12	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Penjelasan :Semua data di imput melalui Aplikasi MySAPK/SIASN</p> <p>Formulasi Perhitungan : Data jumlah</p>	BKPSDM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
				PNS,Kualifikasi,Kompetensi,Kinerja dan Disiplin.	
		13	Skor kompetensi ASN	Penjelasan :Semua data di imput melalui Aplikasi MySAPK/SIASN Formulasi Perhitungan : Data Kompetensi	BKPSDM
6.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	Sekretariat Daerah
7.	Menumbuhkan Budaya Inovasi	15	Indeks daya saing daerah (IDSD)	Pengukuran Indeks dilakukan oleh badan riset dan inovasi nasional (BRIN) berdasarkan perhitungan 4 Komponen yaitu (1) lingkungan pendukung (2) Sumber daya Manusia (3) Pasar (4) Ekosistem Inovasi	Bappeda
8.	Optimalisasi peran masyarakat dan perusahaan swasta dalam pembangunan	16	Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam perencanaan dan penganggaran	<u>Jumlah Usulan Masyarakat yang tertampung dalam perencanaan dan penganggaran</u> x 100% Jumlah usulan masyarakat yang diusulkan pada saat musrembang	Bappeda
		17	Jumlah MoU TJSLP antara pemerintah daerah dan perusahaan	Jumlah MoU TJSLP yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Perusahaan	Bappeda
9.	Menumbuhkan budaya inovasi	18	Indeks inovasi daerah	Penilaian indeks inovasi daerah oleh kemendagri terhadap aspek satuan Pemerintah Daerah dan Aspek Satuan Inovasi	Bappeda

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
10.	Meningkatkan partisipasi pemilih, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pemilu	19	Cakupan wilayah pelaksanaan pemilihan yang aman dan lancar	Wilayah Kabupaten Aceh Barat	Bakesbangpol
		20	Jumlah koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif	13 kali keluar daerah dan 14 kali dalam daerah	Bakesbangpol
		21	Jumlah pelanggaran ringan selama pemilihan	Belum	Bakesbangpol
11.	Meningkatkan Pembinaan dan Pemahaman Nilai nilai Syariat Islam di Masyarakat	22	Indeks pembangunan Syariah (IPS)	$\frac{\text{Persentase penduduk yang memahami pelaksanaan syariat Islam}}{\text{Jumlah penduduk yang di survey}} \times 100\%$	Dinas Syariat Islam
		23	Jumlah kelompok sosial keagamaan	Banyaknya jumlah kelompok sosial keagamaan	Dinas Syariat Islam
12	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi sarana ibadah Islam	24	Jumlah mesjid yang melaksanakan fungsi idarah sesuai klasifikasinya	Jumlah Persentase mesjid yang melaksanakan fungsi idarah	Dinas Syariat Islam
		25	Jumlah mesjid yang melaksanakan fungsi imarah sesuai klasifikasinya	Jumlah Persentase mesjid yang melaksanakan fungsi imarah	Dinas Syariat Islam
		26	Jumlah mesjid yang melaksanakan fungsi ri'ayah sesuai klasifikasinya	Jumlah Persentase mesjid yang melaksanakan fungsi ri'ayah	Dinas Syariat Islam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
13.	Meningkatkan ketersediaan Pangan	28	Ketersediaan pangan Per kapita	$\frac{\text{Produksi-Perubahan Stok} + \text{Impor}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Dinas pangan
14	Meningkatkan kelancaran pasokan ,distribusi,dan stabilitas harga pangan pokok	29	Koefisien variasi harga pangan pokok	$\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata-rata produksi(Kg)}}$	Dinas pangan
15.	Meningkatkan keseimbangan gizi pangan yang di konsumsi masyarakat	30	Pola pangan harapan (PPH)	angka kecukupan Gizi (AKG) X Bobot masing -masing kelompok pangan	Dinas pangan
16.	Meningkatkan Kompetensi, Pemerataan Distribusi dan Kedisiplinan Tenaga Pendidik	31	Persentase tenaga pendidik SD bersertifikasi	Persentase pendidik SD bersertifikat pendidik adalah Persentase Guru yang bersertifikasi dibandingkan dengan jumlah Guru SD. $\frac{\text{Jumlah Guru SD bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru pada jenjang SD}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		32	Persentase tenaga pendidik SMP bersertifikasi	Persentase pendidik SMP bersertifikat pendidik adalah Persentase Guru yang bersertifikasi dibandingkan dengan jumlah Guru SMP. $\frac{\text{Jumlah Guru SMP bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru pada jenjang SMP}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		33	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (Empat) orang guru setiap satuan pendidik	Setiap sekolah yang parallel tidak boleh lebih dari 32 peserta didik dalam satu rombongan belajar dan untuk daerah khusus guru tidak boleh kurang dari 4 (empat) orang secara otomatis sekolah tersebut sudah terpenuhi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Jumlah SD yang memiliki minimal 2 (Dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik	Setiap sekolah untuk guru yang berkualifikasi S1 atau DIV sudah terpenuhi tetapi masih ada guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Disetiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	Setiap mata pelajaran sekolah minimal harus ada 1 (satu) orang guru setiap mata pelajaran begitu juga dengan daerah khusus.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		36	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%	Setiap sekolah jumlah seluruh guru harus 70% berkualifikasi S1 dan DIV sudah terpenuhi untuk separuhnya belum tercapai untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik begitu juga daerah khusus masing-masing masih belum terpenuhi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		37	Di setiap tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing masing satu orang untuk mata pelajaran matematika,IPA,Bahasa Indonesia,dan Bahasa Inggris	Setiap sekolah harus tersedia guru berkualifikasi S1 atau DIV dan memiliki sertifikat pendidik di masing-masing mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		38	Rata rata jumlah jam mengajar	Jam tatap muka guru dengan siswa pada mata pelajaran yang diampunya selama satu semester, atau satu tahun pelajaran. Formulasinya: jumlah hari efektif dikurangi jumlah jam yang digunakan untuk kegiatan ulangan harian, uts, uas dan kegiatan guru lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standard	39	Jumlah SD yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran	Jumlah 155 SD yang sudah tersedia sapsras sesuai standar pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		40	Jumlah SMP yang memenuhi standar sarana prasarana	Jumlah 62 SMP yang sudah tersedia sapsras sesuai standar pembelajaran	Dinas Pendidikan dan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
			pembelajaran		Kebudayaan
		41	Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA dan peralatan sesuai standar	Jumlah 6 (enam) SMP sudah tersedia tetapi setiap sekolah belum semua terpenuhi tersedianya laboratorium IPA dan peralatannya sesuai standar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	42	Rasio dokter umum persatuan penduduk (50 per 100.000 penduduk)	Jumlah dokter umum di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat yang memberikan pelayanan pada semua sarana pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan/BLU D
		43	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (12 per 100.000 penduduk)	Jumlah dokter spesialis di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat yang memberikan pelayanan pada semua sarana pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh penduduk kabupaten Aceh barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100.000	Dinas Kesehatan/BLU D
		44	Rasio bidan per satuan penduduk (130 per 100.000 penduduk)	Jumlah Bidan di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat yang memberikan pelayanan pada semua sarana pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan/BLU D

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		45	Rasio petugas penyuluh kesehatan per satuasn penduduk (18 per 100.000 penduduk)	Jumlah Petugas penyuluh kesehatan di wilayah kerja kabupaten Aceh Barat yang memberikan pelayanan pada semua sarana pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan
		46	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Dalam perhitungan survey kepuasan Masyarakat terdapat unsur-unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai Penimbang di tetapkan dengan rumus, jumlah bobot dibagi jumlah unsur. Untuk memperoleh IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus total dari nilai persepsi pertotal unsur yang terisi dikali nilai penimbang.	Dinas Kesehatan
		47	Jumlah tenaga kesehatan bersertifikasi	Jumlah tenaga Kesehatan diwilayah kerja kabupaten aceh Barat yang bersertifikasi dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan di wilayah kerja kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		48	Jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	Jumlah puskesmas di wilayah kerja kabupaten Aceh Barat yang mendapatkan hasil Akreditasi Utama dalam kurun aktu satu tahun dibagi jumlah Puskesmas keseluruhan diwilayah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
		49	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi Madya	Jumlah Rumah Sakit di wilayah kerja kabupaten Aceh Barat yang mendapatkan hasil Akreditasi Madya dalam kurun aktu satu tahun dibagi jumlah Rumah Sakit keseluruhan diwilayah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	BLUD
19.	Optimalisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	50	Indeks keluarga sehat (IKS)	Jumlah Jawaban yang di bagi 12 di kurangi jumlah N	Dinas Kesehatan
20.	Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	51	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	<u>Jumlah penerima bantuan soial rumah tangga miskin dan rentan</u> x 100% Jumlah keseluruhan penduduk miskin penerima bantuan sosial rumah tangga miskin dan rentan	Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		52	Persentase masyarakat pada kuintil 1-3	Jumlah masyarakat miskin Aceh Barat / Jumlah penduduk Aceh Barat x 100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21.	Meningkatkan Konsumsi Rumah Tangga	53	Jumlah konsumsi/pengeluaran makanan	Data dari BPS	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		54	Jumlah konsumsi/pengeluaran non makanan	Data dari BPS	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22.	Menyediakan lapangan pekerjaan	55	Jumlah UMKM/IKM	Diukur dari jumlah UMKM dan IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Melakukan hilirisasi produk	56	Jumlah IKM di kategori hilir	Diukur dari jumlah IKM Hilir	Dinas Perdagangan, Perindustrian,

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
					Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
24.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	57	Nilai tukar petani (NTP)	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		58	Nilai tukar nelayan (NTN)	$NTN = 9Yt/Et \times 100$	Dinas Kelautan dan Perikanan
25.	Meningkatkan Belanja Pemerintah	59	Jumlah proporsi belanja di sektor riil	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
26.	Meningkatkan investasi	60	Kenaikan nilai realisasi investasi	Akhir dibagi Awal dikali 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27.	Memantapkan Infrastruktur layanan dasar dan pendukung perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah	61	Persentase peningkatan cakupan pelayanan dasar	(Persentase Rumah Layak Huni, persentase rumah dengan ases air minum layak, persentase rumah dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap/baik, persentase Panjang jalan lingkungan) 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
		62	<p>Persentase peningkatan cakupan sumber daya air pertanian</p>	$\frac{\text{Luas cakupan sumber daya air pertanian}}{\text{Luas areal persawahan}}$	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Lingkungan Hidup</p>
		63	<p>Jumlah Trayek angkutan penumpang antar kecamatan</p>	<p>Angkutan penumpang antar kecamatan merupakan salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat untuk mempermudah penduduk dalam melakukan perpindahan. Saat ini angkutan penumpang antar kecamatan dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat sudah tidak tersedia dikarenakan <i>demand</i> angkutan umum antar kecamatan terus menurun seiring berjalannya waktu. Namun, masih terdapat angkutan bus perintis dibawah naungan PERUM DAMRI yang melayani pergerakan masyarakat</p>	<p>Dinas Perhubungan</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
				antar kecamatan.	
28.	Meningkatkan kemampuan kompetensi tenaga kerja	64	Persentase tenaga kerja dilatih yang lulus uji kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{jumlah tenaga kerja yang lulus kompetensi}} \times 100\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
29.	Meningkatkan cakupan informasi lowongan pekerjaan	65	Jumlah media penyebarluasan informasi lowongan kerja	Kumulatif dari media penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
30.	Meningkatkan Prestasi SDM di Bidang Olah Raga dan Kepemudaan	66	Jumlah peraih medali	Cara menghitung jumlah peraih medali, jumlah atlet daerah yang mendapat medali emas, perak dan perunggu yang berprestasi pada ajang/event turnamen/kompetisi/kejuaraan olahraga pada tingkat daerah dan nasional.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		67	Jumlah pemuda/i yang berprestasi	Jumlah pemuda/i yg berprestasi pada even tertentu ditingkat daerah dan nasional dan mendapat piagam penghargaan/trophy dari ajang tersebut.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
31.	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila	68	Persentase unsur pemerintahan gampong yang mengikuti pembinaan nilai-nilai Pancasila	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Gerakan Revolusi Mental. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kerjasama antara Badan Kesbangpol Provinsi Aceh dengan Kesbangpol Aceh Barat dengan jumlah peserta 20 orang terdiri dari perwakilan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
				kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda.	
32.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi	69	Indeks SPBE	Hasil evaluasi Tim SPBE	Dinas Kominsa
		70	Opini BPK	BPK memberi opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		71	Indeks pelayanan Publik	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh KemenPANRB	Sekretariat Daerah
		72	Level Maturitas SPIP	Jumlah Syarat minimalnya terpenuhi jumlah fokus maturitas SPIP	Inspektorat
		73	Indeks kapabilitas APIP	Jumlah syarat minimal terpenuhinya elemen elemen di level 3	Inspektorat
33.	Menegakkan aturan Syariat Islam	74	Jumlah pelanggaran syariat islam	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam dibagi Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti dikali 100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
34.	Meningkatkan Kualitas dan peran dayah	75	Jumlah dayah yang mendapatkan bantuan dana dari provinsi	Jumlah Dayah yang mendapat bantuan berupa insentif pimpinan dayah dan guru dalam setahun	Dinas Pendidikan Dayah
		76	Jumlah guru dayah mengajar di sekolah formal	Jumlah guru yang mengajar di sekolah formal dalam setahun	Dinas Pendidikan Dayah

Pj. BUPATI ACEH BARAT



M A H D I

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTA
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 November 2023

I. SETDAKAB

A. Tugas

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Kabupaten serta pelayanan administratif.

B. Fungsi

- 1) Pengoordinasian kebijakan pemerintah daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Aceh Barat	Perolehan nilai evaluasi AKIP Pemerintah Aceh Barat tahun ini dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP tahun lalu	Bagian Organisasi, Bagian Keuangan	Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang merupakan salah satu komponen penilaian disaat evaluasi	
		Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Hasil Evaluasi	Bagian Pemerintahan	Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	
		Indek Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	IKM sama dengan total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Bagian Organisasi	Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	
		Indek Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi internal dan Ekternal	Bagian Organisasi dan instansi terkait lainnya	Tercapainya delapan area perubahan dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara	
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Bagian Organisasi dan instansi terkait lainnya	Peningkatan pelayanan publik dengan adanya inovasi di setiap SKPK	
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	Hasil Survey Ombudsman RI	Bagian Organisasi dan instansi terkait lainnya	Peningkatan pelayanan publik terhadap 11 SKPK yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat	
3.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Usaha BUMD	Hasil Evaluasi dalam persen	Bagian Perekonomian	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pembinaan BUMD	
		Persentase Kasus Hukum yang didampingi (Litigasi)	Jumlah Kasus Hukum didampingi Litigasi dalam persen	Bagian Hukum	Penyelesaian Kasus Hukum menggunakan Lembaga Pengadilan	
		Persentase Kasus Hukum yang di dampingi (Non Litigasi)	Jumlah Kasus Hukum didampingi Non Litigasi dalam persen	Bagian Hukum	Penyelesaian Kasus Hukum dengan lembaga diluar Pengadilan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Aceh Barat	Bagian Administrasi Pembangunan	Peningkatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Pembangunan Aceh Barat	

II. SEKRETARIAT DPRK ACEH BARAT

A. Tugas

- 1) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRK.
- 2) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRK.
- 3) Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRK.
- 4) Menyediakan dan Mengkoordinasi Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- 2) Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRK.
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- 4) Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRK;
- 5) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan DPRK dan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRK	Persentase Serapan Aspirasi Masyarakat melalui Reses	Jumlah administrasi kesekretariatan yang dibuat (dibagi) tepat waktu Jumlah administrasi kesekretariatan (dikali 100%)	Bappeda, Bagian Hukum, Humas dan Persidangan dan Bagian Keuangan		
2.	Meningkatkan kuantitas Produk Hukum Daerah	Tingkat Kerjasam dengan Eksekutif yang lancar dan tepat waktu	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai (dibagi) standar Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD (dikali 100%)	Bagian Hukum, Humas dan Persidangan		

III. INSPEKTORAT

A. Tugas

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

B. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
- h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

C. Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan		Sumber Data	Penjelasan	Ket
1	Meningkatnya kualitas sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Aceh Barat	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Ihktisar Hasil penilaian Maturitas SPIP Oleh BPKP	PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai Indeks	Hasil Survei/Penilaian dari KPK	Hasil Verifikasi dan Validasi Tim KPK	UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
		Persentase Penyelesaian Temuan di Perangkat Daerah	%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100%	Laporan Rekapitulasi pemantauan Hasil temuan Pengawasan APIP	UU No 30 Tahun 2014 Pasal 20	

IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

- a) Penyelenggaraan perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c) Pengelolaan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan normal;
- e) Pelaksanaan pemindahan pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan;
- f) Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pendidikan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- g) Pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- h) Pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- i) Pelaksanaan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;
- j) Pelaksanaan pembinaan kesenian, bahasa dan sastra;
- k) Pelaksanaan pembinaan sejarah local, cagar budaya dan permuseuman;
- l) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
- m) Pembinaan UPTD;
- n) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C. Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kompetensi, pemerataan distribusi dan kedisiplinan tenaga pendidik	Angka kelulusan SD	$\frac{\text{Jumlah lulusan SD}}{\text{Jumlah siswa SD yang ikut ujian}} \times 100\%$	Persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu yang lulus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka kelulusan SMP	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP}}{\text{Jumlah siswa SMP yang ikut ujian}} \times 100\%$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase guru SD yang memenuhi jumlah jam mengajar	$\frac{\text{Jumlah jam tersedia}}{24 \text{ jam}} \times 100\%$	Menunjukkan ketersediaan guru mengajar 24 jam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase guru SMP yang memenuhi jumlah jam mengajar	$\frac{\text{Jumlah jam tersedia}}{24 \text{ jam}} \times 100\%$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase SD yang terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah SD yang terakreditasi A}}{100\% \text{ Jumlah total SD}}$	Menunjukkan jumlah SD/SMP yang terakreditasi A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase SMP yang terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah SMP yang terakreditasi A}}{100\% \text{ Jumlah total SD}}$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah siswa PAUD dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Murni PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah jenjang}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5 - 6 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun yang bersekolah pada PAUD dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar SD	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah siswa SD dengan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Murni SD	$\frac{\text{Jumlah murid usia 7 - 12 tahun jenjang SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah pada SD dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah siswa SMP dengan penduduk kelompok usia 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
		Angka Partisipasi Murni SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun jenjang SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada SMP dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata nilai rapor muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah nilai rapor muatan lokal}}{\text{Jumlah semester}} \times 100\%$	Menunjukkan nilai rapor muatan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio guru SD terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru SD per kelas}}{\text{Jumlah murid SD}} \times 10.000$	Jumlah guru per kelas tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio guru SMP terhadap siswa per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru SMP per kelas}}{\text{Jumlah murid SMP}} \times 10.000$	Jumlah guru per kelas tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase objek budaya yang terlestarikan	$\frac{\text{Jumlah objek budaya yang terlestarikan}}{\text{Jumlah total objek budaya}} \times 100\%$	Menunjukkan objek wisata yang terlestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah pelaku seni yang aktif	Perhitungan jumlah pelaku seni budaya yang aktif	Menunjukkan jumlah pelaku seni yang aktif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
		Tingkat pemahaman nilai sejarah lokal di kalangan siswa SD/SMP	Jumlah siswa SD/SMP yang memahami nilai sejarah lokal	Menunjukkan jumlah kalangan SD/SMP yang memahami sejarah lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

V. DINAS KESEHATAN

A. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan yang diberikan kepala daerah.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknik seduai dengan lingkup tugasnya
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan Kesehatan daerah dan daerah terpencil dan tertinggal
5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan Kesehatan kabupaten dan membantu tugas umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan
6. Pembinaan UPT/UPTD dalam lingkup Kesehatan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan lBupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FOEMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu yang sma dikali 100	Dinas Kesehatan	Pendek dan sangat pendek pada balita 0-5 tahun (%)	
		Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian ibu diwilayah kerja Kab. Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup diwilayah kerja Kab. Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dikali 100.000	Dinas Kesehatan	Banyaknya kematian ibu pada saat hamil melahirkan dan masa nifas tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kahamilannya atau pengololanya dan bukan karena sebab lain per 100.000 kelahiran hidup	
		Angka Kematiam Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari) di satu Wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup d iwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000 Jumlah Kematian yang Terjadi di tahun berkenaan	Dinas Kesehatan	Banyaknya kematian neonatal (0-28 hari) pada saat kelahiran tanpa memandang lama dan tempat kelahiran dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 kelahiran hidup	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FOEMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian Bayi diwilayah kerja Kab. Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup diwilayah kerja Kab. Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dikali 1000	Dinas Kesehatan	Banyaknya kematian bayi pada saat kelahiran tanpa memandang lama dan tempat kelahiran dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 kelahiran hidup	
		Cakupan pasien tertangani di RSUD	Jumlah Pasien tertangani pada RSUD di Kabupaten Aceh Barat dibagi jumlah keseluruhan pasien yang berobat ke RSUD termasuk yang harus dirujuk dikali 100	Dinas Kesehatan	Cakupan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan ketersediaan kelengkapan pelayanan pada RSUD baik sumber daya manusia (Spesialis dan sub Spesialis) maupun pemeriksaan sarana dn prasarana lainnya sehingga angka rujukan bisa diturunkan	
		Cakupan pasien tertangani di fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP)	Jumlah Pasien tertangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Aceh Barat dibagi jumlah keseluruhan pasien yang berobat di seluruh fasilitas kesehatan di kabupaten Aceh barat termasuk yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dikali	Dinas Kesehatan	Cakupan kinerja pemerintahDinas kabupaten Aceh Barat dalam Kesehatan mewujudkanketersedian kelengkapanpelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik Sumber Daya Manusia maupun pemeriksaan sarana dan prasarana lainnya sehingga angka rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FOEMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
			100		lanjut bisa diturunkan	
		Penurunan kunjungan pasien ke fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP)	Jumlah kunjungan pasien ke FKTP di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kunjungan FKTP Kabupaten Aceh Barat pada tahun sebelumnya dikali 100	Dinas Kesehatan	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan masyarakat sehat sehingga berkurang kunjungan berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	
		Persentase Pelaku Usaha Makanan Minuman yang Memiliki Izin	Jumlah Pelaku usaha makanan minuman yang memiliki izin di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah keseluruhan pelaku usaha makanan minuman di Kabupaten Aceh Barat dikali 100	Dinas Kesehatan	Banyaknya pelaku usaha makanan minuman yang memiliki izin di Kesehatan wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat	
		Cakupan rumah tangga Sehat	Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memberikan pelayanan rumah tangga sehat dalam satu tahun berdasarkan 12 indikator	Dinas Kesehatan	Cakupan kinerja Pemerintah Dinas Kabupaten Aceh Barat dalam Kesehatan mewujudkan Rumah Tangga Sehat	

VI. DINAS PEKERJAAN UMUM DAM PENATAAN RUANG

A. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai dan sungai dalam wilayah Daerah kabupaten;
- 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah Kabupaten;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Daerah kabupaten;
- 4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten;
- 5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten;
- 6) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam Daerah kabupaten;
- 7) Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
- 8) Pengendalian pemberian rekomendasi izin pertambangan batuan wilayah sungai, izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat lain fungsi bangunan dan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- 9) Penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan serta lingkungannya dalam Daerah kabupaten;
- 10) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
- 11) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil bidang konstruksi;
- 12) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
- 13) Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
- 14) Penyelenggaraan pengujian dan pengawasan mutu konstruksi dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menetapkan infrastruktur layanan dasar dan pendukung perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah	Persentase peningkatan cakupan pelayanan dasar	(Persentase rumah layak huni, persentase rumah dengan akses air minum layak, persentase rumah dengan akses sampah yang terkalola dengan baik di perkotaan, persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap/baik persentase Panjang jalan lingkungan) _____ X 100 5	RPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2023-2026		
		Persentase peningkatan cakupan sumber daya air pertanian	Luas cakupan sumberdaya air pertain _____ X 100 Luas area persawahan	RPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2023-2026		

VII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Insfrastruktur sosial yang berkualitas	Persentase Rumah tidak layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BPS	Menghitung persentase rumah tidak layak huni dengan cara membagi nilai jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk kemudia dikali 100%	
		Persentase Kawasan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan KOTAKU	Data luas kawasan pemukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah kemudian hasilnya dikali dengan 100% perhitungan ini untuk mencari persentase permukiman kumuh	
2.	Meningkatkan kualitas sarana pembangunan untuk kebutuhan masyarakat luas	Persentase pemukiman dengan PSU baik	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas Area pemukiman keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BPS	Salah satu cara menghitung persentase kawasan permukiman tertata	

VIII. DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas

Melaksanakan Urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan

B. Fungsi

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan darat dan laut;
- 2) Melakukan koordinasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, jaringan trayek dalam kabupaten, penyediaan fasilitas keselamatan jalan/alat perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ Pengendalian pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin pengelolaan bidang perhubungan darat dan laut;
- 3) Pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, fasilitas parkir umum di ruang milik jalan, dan pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengelolaan terminal penumpang Type C dan Terminal barang serta pelabuhan penyeberangan.
- 4) Melakukan koordinasi tentang hasa angkutan umum dan penetapan tarif Ekonomi Angkutan Orang yang melayani trayek angkutan perkotaan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dan kabupaten;
- 5) Melakukan koordinasi dan penetapan tarif Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 6) Melakukan koordinasi terhadap penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul lokal, sungai, dan danau;
- 7) Pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat dan perhubungan laut;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Angkutan Umum Transportasi	Cakupan Trayek Angkutan	Jumlah kecamatan yang memiliki trayek transportasi dibagi Jumlah Kecamatan Keseluruhan dikali 100%	Bidang Perhubungan Darat	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003	
2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Pelabuhan	Cakupan kegiatan DLKR/DLKP	Jumlah DLKR/DLKP yang terlayani dibagi Jumlah total DLKR/DLKP dikali 100%	Bidang Perhubungan Darat	Peraturan Menteri Perhubungan No.57 Tahun 2020	

IX. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

A. Tugas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

- 1) Pelaksanaan Administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- 2) Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan ;
- 5) Pelaksanaan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan kualitas pembinaan atlet	Persentase peningkatan prestasi atlet	$\frac{\text{Jumlah atlet yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	atlit yang dibina pada kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah	
		Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti	Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada turnamen/kompetisi/even kejuaraan olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Cabang olah raga yang diikuti seperti sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya	
2.	Pelaksanaan seleksi dan rekrutmen anggota kepramukaan	Persentase Penggalang kategori Rakit	$\frac{\text{Jumlah penggalang rakit yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh penggalang rakit}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	peningkatan jumlah anggota pramuka yang berpartisipasi pada kegiatan kepramukaan	
	Pemberian apresiasi bagi pelatih dan atlet berprestasi	Persentase pemuda berprestasi di tingkat Aceh/Nasional	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berprestasi}}{\text{Jumlah seluruh pemuda}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda / i yang berpartisipasi pada setiap even/kompetisi di tingkat daerah/nasional dan mendapat piagam penghargaan/trophy	
	Menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif	Kontribusi pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya kontribusi untuk peningkatan PDRB daerah dari Sektor pengembangan Pariwisata	
		Persentase PAD sektor	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata	adanya kontibusi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		pariwisata		Pemuda dan Olahraga	pendapatan sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD	
		Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata <u>se-Kabupaten dan Kota</u> Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota x 100 %	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan dengan membangun dan merehabilitasi objek destinasi wisata dan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan pameran/expo dan kegiatan lainnya	
		Persentase usaha ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif <u>yang dibina</u> jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100 %	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	

X. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Tugas

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

B. Fungsi

- 1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan
- 2) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan Pembinaan pada Petani Pembudidaya Ikan, Nelayan Perikanan Tangkap serta pada Pengolah Hasil Perikanan.
- 4) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi Kelautan dan Perikanan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli secara teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.

C. Indikator kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase Hasil Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahunannya	Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan selama setahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan	Persentase Hasil Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya ikan Tahunannya	Jumlah Produksi Perikanan Pembudidaya Ikan selama setahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	Meningkatnya Pengawasan Perikanan Dan Kawasan Budidaya Ikan	Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Jumlah Kecamatan yang terawasi tahunannya	Terjaganya Kelestarian Lingkungan dan Sumberdaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	Meningkatnya Keperantaraan Pasar	Rata-rata peningkatan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha pengolahan tahunannya	Pengembangan yang berkelanjutan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

XI. DINAS PERDAGANGAN

A. Tugas

Melaksanakan Urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

B. Fungsi

- 1) Pengkoordinasian dan fasilitasi perizinan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Pengkoordinasian pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan usaha perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- 3) Pengoordinasian perumusan kebijakan stabilitas harga, barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) Penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan;
- 5) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- 6) Pengoordinasian penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- 7) Pengendalian dan pelaporan informasi industri penyelenggaraan IUI dan izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
- 8) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi);
- 9) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi(KSP/USP-Koperasi);
- 10) Penyelenggaraan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP- Koperasi);
- 11) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- 12) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten;
- 13) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)	Frekuensi RAT/Tahun	Berdasarkan Laporan Keuangan/RAT	Koperasi, ODS	Finalisasi setiap akhir tahun
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) sehat	Jumlah Koperasi Aceh Barat/Jumlah Koperasi Sehat	Berdasarkan RAT	Koperasi, ODS	Finalisasi setiap akhir tahun
		Persentase yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu	Jumlah koperasi yang Melakukan RAT pada Tahun Berjalan	Berdasarkan Laporan Keuangan/RAT	Koperasi, ODS	Finalisasi setiap akhir tahun
		Persentase rumah tangga miskin yang bergabung dalam koperasi	Jumlah Masyarakat Aceh Barat/Anggota Koperasi Aceh Barat	Berdasarkan Data Keragaan dan ODS	ODS	Finalisasi setiap akhir tahun
2	Mengembangkan Hilirisasi Produk UMKM	Persentase peningkatan pendapatan UMKM	Jumlah Rata-rata Pendapatan Umkm – Jumlah Rata-rata Pendapatan Perbulan / Jumlah Rata-rata Pendapatan UMKM x 100	Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Finalisasi setiap Bulan
		Persentase peningkatan pekerja UMKM/IKM	Jumlah Rata-rata Pekerja Umkm – Jumlah Rata-rata Pekerja Perbulan / Jumlah Rata-rata Pekerja UMKM x 100	Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha Pada Saat Pendampingan	Pelaku Usaha	Finalisasi setiap Bulan
3	Meningkatkan Keperantaraan Pasar	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah	Persentase Keuntungan / Besar Keuntungan dengan harga pembelian x 100%	Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha Pada Saat Pendampingan	Pelaku Usaha	Finalisasi setiap akhir tahun

4	Mengembangkan Hilirisasi Produk UMKM	Jumlah pasar lelang komoditi pertanian	Unit	Melakukan Survey Lapangan dan Pendataan	Aplikasi OSS, Pelaku Usaha, BPS	Finalisasi setiap akhir tahun
		Jumlah gudang komoditi pertanian	Unit	Melakukan Survey Lapangan dan Pendataan	Aplikasi OSS, Pelaku Usaha, BPS	Finalisasi setiap akhir tahun
		Tingkat Inflasi	Tingkat Harga Komoditi di Pasar	melakukan Pemantauan Harga Setiap Hari	Pedagang, BPS	Finalisasi setiap Hari, Minggu, Bulan, dan Tahun
		Persentase akurasi kemetrolagian	Persentase 100 %	Pengukurannya menggunakan alat standar untuk hasil akurasi kemetrolagian yaitu sah atau Batal dengan melakukan uji kelayakan	Pengawasan atau Survey langsung	Finalisasi setiap tahun
		Jumlah UMKM yang memiliki kerja sama pemasaran	Jumlah UMKM yang memiliki kerjasama Pemasaran / Jumlah UMKM	Melakukan Pendataan dan Survey	Database	Finalisasi Persemester
		Jumlah UMKM komoditi pertanian yang memiliki akses e-commerce	Jumlah UMKM Komoditi Pertanian yang memiliki akses e-commerce / Jumlah UMKM	Melakukan Pendataan dan Survey	Database	Finalisasi setiap akhir tahun
		Rata-rata peningkatan pendapatan IKM Hilir	Total nilai produksi IKM Hilir / Jumlah IKM Hilir	Melakukan Pengelompokan IKM Hilir	Database	Finalisasi setiap akhir tahun
5	Melakukan Pembinaan	Persentase IKM yang dibantu tepat sasaran	Jumlah industri yang dibantu tepat sasaran / Jumlah total industri x 100	Melakukan pendampingan langsung	Database	Finalisasi setiap akhir tahun

XII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tugas

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Kewenangan Daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Penyediaan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyediaan laporan pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kapasitas aparatur	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Pengukuran IDSD dilakukan Oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan perhitungan 4 komponen yaitu : (1) lingkungan pendukung; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Pasar; (4) Ekosistem Inovasi;	Untuk melihat ukuran daya saing daerah secara komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah	Dokumen Indeks Daya Saing Daerah	
2	Optimalisasi peran Masyarakat dan perusahaan swasta dalam pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam perencanaan dan penganggaran	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang tertampung dalam RKPD}}{\text{Jumlah usulan masyarakat yang diusulkan pada saat musrenbang Kabupaten}} \times 100\%$	Untuk melihat banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen RKPD	
		Jumlah MoU TJSLP antara Pemerintah daerah dan Perusahaan	Jumlah MoU TJSLP yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Perusahaan	sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kolaborasi pembangunan daerah antara perusahaan swasta dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui sumber dana TJSLP	Laporan TJSLP	

3	Menumbuhkan budaya Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Penilaian Indeks Inovasi Daerah Oleh Kemendagri terhadap aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Aspek Satuan Inovasi.	merupakan suatu sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah	Laporan Inovasi	
---	----------------------------	-----------------------------	---	--	-----------------	--

XIII. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

A. Tugas

Melaksanakan Urusan pemerintahan Bidang Pertanian

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Penyusunan program Penyuluhan Pertanian
- 3) Pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- 4) Pengendalian peredaran dan penyediaan serta pengawasan mutu benih tanaman;
- 5) Pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana serta pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian;
- 6) Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 7) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- 8) Pengendalian dan penanganan produksi pertanian akibat bencana alam;
- 9) Pembinaan peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 10) Pemberian rekomendasi dan pengawasan izin usaha pertanian;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib)	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mewujudkan Kesejahteraan petani	
		Produktivitas Padi	Produksi padi (Ton)/luas tanam (Ha)	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura		

XIV. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

A. Tugas

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- 2) Penyusunan program penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- 3) Pengembangan prasarana perkebunan dan peternakan;
- 4) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5) Pengawasan penggunaan sarana perkebunan dan peternakan;
- 6) Pembinaan produksi di bidang perkebunan dan peternakan;
- 7) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9) Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- 10) Pelaksanaan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- 11) Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis perkebunan dan peternakan;
- 12) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- 13) Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	Jumlah produksi komoditi kelapa sawit	Komoditas unggulan masyarakat dan dapat memberi kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian	DISBUNNAK	
		produksi Kelapa Dalam	Jumlah produksi komoditi kelapa dalam			
		produksi Pinang	Jumlah produksi komoditi pinang			
2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Peternakan	Produksi Daging	Jumlah Produksi Daging			

XV. DINAS PANGAN

A. Tugas

Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 3) Pengoordiansian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan kemanan pangan;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja pelayanan Informasi	Tingkat kepuasa Masyarakat terhadap layanan pemerintah	Hasil survay	Dinas Pangan	Permenpan RB nomor 53 tahun 2014	
2.	Lancarnya mutasi arus bahan pangan dari dan keluar daerah produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketersediaan komoditas pangan terhadap kebutuhan 2. Rasio angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan 3. Rasio angka kecukupan energi (AKE) 4. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) komoditi pangan poko strategis 	<p>Analisis neraca bahan makanan</p> <p>Jumlah pengadaan komoditi pangan</p>	Dinas Pangan	Terpenuhinya ketersediaan pangan	
3.	Tertanganinya daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya peningkatan pemamfaatan melalui KWT (Gampong) 2. Jumlah Kawasan mandiri pangan 	Jumlah gampong/KWT	Dinas Pangan	Dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan serta mengurangi produk pertanian impor	
4.	Meningkatnya kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10 % diatas 10% HET/harga pasar 2. Inflasi pangan bergejolak 	Survey harga pasar	Dinas Pangan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
5.	Tersedianya pangan local dan berkembangnya diversifikasi pangan	Jumlah produksi pangan lokal	Survey pasar/Produsen	Dinas Pangan		
6.	Meningkatnya Pembangunan sumber daya lokal	Jumlah/jenis produk pangan dari sumber daya lokal	Survey pasar	Dinas Pangan		
7.	Meningkatnya pola konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat	1. Rasio realisasi skor PPH konsumsi terhadap target yang ditetapkan 2. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1. Analisis PPH 2. Hasil uji lab/post market	Dinas Pangan		

XVI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

A. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan penataan gampong;
- 2) Fasilitas kerja sama antar gampong dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Gampong;
- 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Gampong dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten;
- 5) Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten;
- 6) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat tingkat Gampong;
- 7) Pembinaan Pemerintahan Gampong dan Kelembagaan Gampong;
- 8) Pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

C. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi gampong;	Tingkat akurasi atribut desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah memasang Atribut Desa}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa di Aceh Barat}} \times 100\%$	Atribut Desa diantaranya : - Batas Wilayah - Nama Gampong - Nama Jalan - Nama Lorong	DPMG	-
		Persentase APBG tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah menetapkan APBG}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa di Aceh Barat}} \times 100\%$	Penyampaian Laporan APBG paling telat 31 Desember	DPMG	
		Persentase profil gampong yang ter-update	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah meng Update Profil Desa}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa di Aceh Barat}} \times 100\%$	Profil Desa diantaranya : - Struktur Pemerintahan Desa - Struktur Organisasi PKK - Data Pembaharuan Profil Desa - Peta wilayah Desa - Dan Lain Lain	DPMG	

2	Terlaksananya pemanfaatan Sumber Daya berwawasan teknologi tepat guna;	Cakupan masyarakat yang mengaplikasikan TTG	Jumlah Target TTG Tahun (n) - Jumlah TTG (aktif/digunakan) di Tahun (n)	TTG merupakan Inovasi terbaru dan untuk diperlombakaan	DPMG	
---	--	---	---	--	------	--

XVII. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

A. Tugas

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan/membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan.

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang memperoleh pekerjaan	Meningkatkan Kesempatan dan Pelatihan tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang memperoleh Pekerjaan}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	Bidang ketiga kerjaan		
2.	Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	$\frac{\text{Jumlah kerja yang memperoleh Pekerjaan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	Bidang ketiga kerjaan		
3.	Pekerja/ Karyawan yang bermasalah, SPSI, APINDO, KADIN	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenaga Kerjaan	$\frac{\text{Jumlah kasus tenaga kerja yang dilesaikan}}{\text{Jumlah perselisihan ketenaga kerjaan}} \times 100\%$	Bidang ketiga kerjaan	UU No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industial	
4.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang aktif	Jumlah Unit Kawasan Pemukiman Transmigrasi tahun lalu (n-1) / Jumlah Unit Kawasan Pemukiman Transmigrasi tahun (n)	Bidang Transmigrasi		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pembangunan Transmigrasi yang layak dan memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang	Jumlah Satuan Pemukiman mandiri pada kawasan Transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi yang menerima Pelatihan dan Penyuluhan tahun (n) / Jumlah Warga Transmigrasi tahun (n)	Bidang Transmigrasi		

XVIII. DINAS SOSIAL

A. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

- 1) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah Kabupaten;
- 2) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- 5) Pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat bencana alam dan bencana sosial;
- 7) Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- 8) Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti asuhan;
- 9) Pengalokasian sumber daya manusia potensial; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Prosentase angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada dikali 100%	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	UU Nomor 11 Tahun 2009	
2.	Terwujudnya pelayanan optimal terhadap korban bencana	Prosentase korban dampak bencana yang tertangani	Jumlah korban dampak bencana yang tertangani dibagi jumlah bencana yang ada dikali 100%	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	UU Nomor 24 Tahun 2007	
3.	Menurunnya kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin	100 kurang angka kemiskinan	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	UUD Tahun 1945	
4.	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Daerah	Perolehan Nilai LAKIP	Nilai evaluasi	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	Permenpan dan RB nomor 53 tahun 2014	
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah	Hasil Survey	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	Peningkatan pelayanan public terhadap SKPK	

XIX. DINAS SYARIAT ISLAM

A. Tugas

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan khususnya yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Syariat Islam dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kegiatan pelaksanaan Syariat Islam meliputi aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu pembinaan dan peningkatan kualitas laporan dan mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

- 1) Pengordinasian dan pengendalian perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kehidupan beragama dan Syariat Islam.
- 2) Pengoordinasian dan pengendalian perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama dan penerapan Syariat Islam.
- 3) Pengoordinasian pembinaan di bidang kehidupan beragama dan Syariat Islam.
- 4) Pengoordinasian dan pengendalian pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan.
- 5) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerjasama antar lembaga dibidang kehidupan beragama dan penerapan Syariat Islam.
- 6) Pengawasan dan pengendalian dibidang kehidupan beragama dan Syariat Islam.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait
- 8) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Pemahaman Nilai-Nilai Syariat Islam di Masyarakat	Cakupan Tenaga Keagamaan	Persentase jumlah tenaga keagamaan	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Tenaga keagamaan yang dilatih dan diberi pelatihan	
		Penurunan Pelanggaran Syariat Islam	Persentase jumlah Pelanggaran Syariat islas	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Banyaknya masyarakat yang tidak melanggar syariat	
		Persentase Takmir Masjid yang memahami fungsi Masjid	Jumlah Persentase Takmir Masjid yang memahami fungsi Masjid	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Jumlah Persentase Takmir Masjid yang memahami fungsi Masjid	

XX. DINAS PENDIDIKAN DAYAH

C. Tugas

Dinas pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh dibidang pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan daerah

D. Fungsi

- 1) Perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
- 2) Perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pendidikan dayah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pendidikan dayah
- 4) Pembinaan pendidikan dan manajemen dayah;
- 5) Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Penyelenggaraan dan pembinaan bakat minat santri;
- 7) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- 8) Pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif
- 9) Pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pendidikan serta lembaga dayah; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas dan Peran Dayah	Cakupan dayah teakreditasi	Jumlah dayah yang terakreditasi dibagi (:) Jumlah dayah yang ada di Aceh Barat dikali (x) 100%	Dinas Pendidikan Dayah	Memenuhi kreteria 8 standar penilaian akreditasi dayah Yaitu : 1. Visi, Misi dan tujua Lembaga Pendidikan dayah 2. Tata Kelola kepemimpinan dan Kerjasama 3. Santri dan tenaga pendidik 4. Sumber daya 5. Sarana dan prasarana dayah 6. System informasi dayah 7. Manajemen keuangan dayah 8. Penerapan kurikulum dayah	

XXI. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Penyelenggaraan penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
- 3) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- 4) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBK;
- 7) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK (DPPA-SKPK);
- 8) Penyelenggaraan pelaksanaan APBK dan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 9) Pengkajian dan penyiapan pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
- 10) Penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 11) Penyajian informasi keuangan daerah;
- 12) Penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Belanja Pemerintah	Peningkatan PAD	Realisasi PAD dibagi dengan Total Pendapatan Daerah	Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan	
2.	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Penetapan APBD Tepat Waktu (31 Desember)	Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Legislatif	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa Penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember	
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi dengan jumlah perangkat daerah	Hasil Rekon Laporan Keuangan Tahunan dengan BPKD	Penyerahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) tepat waktu adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disusun	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah secara tertib	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah	Hasil rekonsiliasi Penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah	

XXII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH

A. Tugas

RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional/penunjang pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan nonmedik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Barat..

B. Fungsi

- 1) Perumusan rencana kerja;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
- 6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 7) Pembina pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- 8) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pelayanan	Cakupan Pasien Tertangani di RSUD	Jumlah pasien yang ditangani di rumah sakit di bagi jumlah pasien yang datang dikali 100%	Laporan Mutu	Pasien tertangani adalah pasien yang datang kerumah sakit yang mendapat pelayanan, baik pelayanan IGD, rawat jalan, rawat inap dan layanan penunjang lainnya dari rumah sakit.	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD CND	Survey	laporan IKM	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan kebutuhannya	
		Tingkat Akreditasi	Survey	Hasil survey akreditasi	Target daripada tingkat akreditasi adalah paripurna. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi. Predikat ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan difaskes tingkat akreditasi	
		Kelas Rumah Sakit	Survey	Hasil survey kelas rumah sakit	Kelas rumah sakit adalah yang dicapai adalah rumah sakit tipe B pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi	

XXIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Tugas

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Aceh Barat setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

B. Fungsi

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- 4) Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- 5) Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengurangi Risiko Bencana	Penurunan jumlah korban jiwa	Jumlah Korban Jiwa Tahun Lalu (n-1) - Jumlah Korban Jiwa Tahun Sekarang (n)	BPBD Kab. Aceh Barat		
		Penurunan jumlah kerugian harta benda	Jumlah Kerugian Harta Benda Tahun Lalu (n-1) - Jumlah Kerugian Harta Benda Tahun Sekarang (n)	BPBD Kab. Aceh Barat		
		Persentase Bencana Alam Yang Dapat Ditanggulangi	Jumlah Bencana Alam Yang <u>Ditanggulangi</u> Jumlah Bencana Alam Yang terjadi	BPBD Kab. Aceh Barat		
2.	Meningkatkan Kapasitas SDM Kebencanaan	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Jumlah Sekolah Siaga Terhadap <u>Bencana</u> Jumlah Sekolah	BPBD Kab. Aceh Barat		
		Persentase petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	BPBD Kab. Aceh Barat		
3.	Meningkatkan Kualitas Layanan Kebencanaan	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 <u>menit</u> Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	BPBD Kab. Aceh Barat		
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Jangkuan luas wilayah manajemen <u>kebakaran</u> Luas wilayah kabupaten atau kota	BPBD Kab. Aceh Barat		

XXIV. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Tugas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan..

B. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan,
- 5) Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- 6) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C.Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Penataan dan Kinerja ASN	Cakupan layanan kepegawaian yang tersedia	Seluruh pelaksanaan layanan kepegawaian	BKPSDM	Pelayanan Kepegawaian: 1. Kenaikan Gaji Berkala 2. Kenaikan Pangkat 3. Pensiun 4. Dll tentang ASN	
2.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang telah mengikuti Diklat <u>Kepemimpinan</u> Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Dikali 100 persen)	BKPSDM		

XXV. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
- 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender;
- 3) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 4) Pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
- 5) Pembinaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 6) Penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 7) Pengoordinasian penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- 8) Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan hak anak;
- 9) Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 10) Pelaksanaan fasilitas Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 11) Pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap anak dengan pihak terkait;
- 12) Pengoordinasian penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 13) Pengsinkronisasian kebijakan pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- 14) Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- 15) Pembinaan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
- 16) Pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB;
- 17) Pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
- 18) Pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- 19) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peran serta perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan manusia (<u>Perempuan</u>) Indeks pembanguana manusia(Laki-laki dikali 100%	BPS aceh Barat dan BPS Aceh	Indeks pembanguna gender adalah indikator yang menggambarkan perbandinagn (Rasio) capaian antara indeks pembagunan manusia (IPM) Perempuan IPM laki-laki. 3 unsur yang dinilai dalam indeks Pembangunan manusia yaitu 1. Umur Panjang hidup 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak	
		Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang Dihasilkan	Jumlah Kebijakan dan peraturan PUG dan anak yang telah ada/dihasilkan	DP3AKB/Bappeda /Bagiab Huum Setdakab	Jumlah Kebijakan atau peraturan yang sudah pernah diterbitkan atau dilahirkan tentang persamaan gender (PUG) dan anak diKabupaten Aceh Barat	
		Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator KLA yang telah <u>terlaksana</u> Total indikator kota layak anak dikali 100%	DP3AKB	Jumlah Indikator KLA yang telah terlaksana adalah indikator KLA yang telah ada dan dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedangkan total indikator KLA adalah total indikator KLA baik yang telah ada di Kabupaten Aceh Barat dan diberikan penilaian oleh kementrian pusat sesuai tingkat keberhasilan dan jumlah indikator KLA yang telah dilaksnakan	
2.	Tertanganinya Kasus-kasus	Rasio KDRT	Jumlah KDRT terhadap <u>Perempuan dan anak</u>	DP3AKB/Polres Aceh	Data Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 1	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		Jumlah Kasus anak yang dilaporkan dikali 100%	Barat/P2TP2A	januarai s/d 31 desember 2023 dan data jumlah keluarga/rumah tangga dalam kurun waktu 1 januari s.d 31 Desember 2023	
		Persentase Kasus Anak yang Diselesaikan	Jumlah Kasus anak yang <u>diselesaikan</u> Jumlah Kasus anak yang dilaporkan dikalikan 100%	DP3AKB/Polres Aceh Barat/P2TP2A	Jumlah kasus anak yang dapat diselesaikan dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun	
3.	Meningkatnya Akseptor KB dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$P = \frac{(L-M)+(I-O)}{Pa}$ Dikalikan 100 %	DP3AKB dan Disdukcapil	P = Jumlah Pertumbuhan Penduduk L = Jumlah Kelahiran dalam 1 tahun M = Jumlah Kematian dalam 1 Tahun I = Jumlah penduduk pendatang (Imigran) O = Jumlah Penduduk keluar (Emigran)	
		Rasio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan Usia Subur (PUS)}}$	DP3AKB	Jumlah peserta K3 aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang memakai salah satu dari alat kontrasepsi KB, sedangkan pasangan usia subur (PUS) adalah Perempuan bersuami usia antara 15 s/d 49 tahun	

XXVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 2) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah dan pelestarian naskah kuno milik daerah;
- 3) Pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah;
- 4) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 5) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD;
- 6) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Kabupaten, BUMD, perusahaan swasta organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, Pemerintahan Gampong dan tokoh masyarakat;
- 7) Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- 8) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- 9) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana dan penggabungan, pembubaran dan pemekaran Perangkat Daerah, Kecamatan dan Gampong;
- 10) Pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alihmedia yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten;
- 11) Pelaksanaan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
- 12) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah;
- 13) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan/koleksi perpustakaan serta melakukan pembinaan perpustakaan dan pengembangan minat/budaya baca	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam wilayah Aceh Barat pertahun (Orang)	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten + Jumlah Pengunjung Perpustakaan Digital Kabupaten + Jumlah Pengunjung Pustaka Keliling	Daftar rekapitulasi pengunjung perpustakaan umum kabupaten, perpustakaan digital kabupaten dan perpustakaan keliling.	Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember	
2.	Meningkatakan perlindungan dan pelestarian naskah kuno	Persentase naskah kuno yang terawat	<u>Jumlah naskah kuno yang terawat</u> Jumlah daftar kuno yang terdaftar (dikali 100%)	Daftar rincian naskah kuno di kabupaten Aceh Barat.	Jumlah Naskah Kuno Yang Terawat adalah jumlah naskah kuno yang ada ditangan masyarakat atau yang sudah diakuisisi. Sedangkan Jumlah Naskah Kuno Yang Terdaftar adalah jumlah naskah kuno yang sudah terdata pada Dispusip Kabupaten Aceh Barat.	
3.	Melakukan pemberdayaan dan pembinaan kearsipan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	<u>Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku</u> Jumlah keseluruhan OPD (dikali 100%)	Daftar rekapitulasi OPD yang telah mengelola arsip secara baku dan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang pembentukan OPD.	Jumlah Keseluruhan OPD adalah jumlah keseluruhan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatkan system pengelolaan arsip aibat bencana	Persentase Arsip Yang Dapat Digunakan	<u>Jumlah arsip bencana yang telah di akuisisi</u> Jumlah keseluruhan arsip bencana (dikali 100%)	Daftar rekapitulasi arsip covid-19 yang telah diakuisisi per OPD per tahun anggaran.	<p>1) Arsip bencana adalah arsip bencana Covid-19;</p> <p>2) Jumlah Arsip bencana yang telah diakuisisi adalah arsip bencana yang dapat digunakan dan telah diakuisisi;</p> <p>3) Jumlah keseluruhan arsip bencana diklasifikasi berdasarkan jumlah tahun penganggaran covid-19 di masing-masing SKPK pengelola dana terkait Covid-19, contohnya: SKPK A mengelola Dana Covid-19 pada Tahun 2021 dan 2022 artinya terdapat 2 arsip bencana pada SKPK A.</p>	

XXVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pelayanan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- 2) Pengoordinasian penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 3) Pengoordinasian pembuatan peta potensi investasi Kabupaten;
- 4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 7) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C.Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya angka Investasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	BPS	DPMPTSP (Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Bidang Penanaman Modal)	Perka BKPM RI No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perka BKPM RI No. 4 Tahun 2014 Tentang SPIPISE Perka BKPM No. 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal.	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan	BPS			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	BPS			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kontruksi	BPS			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	BPS			
		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) dalam setahun			
		Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah investor (PMDN/PMA) dalam setahun			
2.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik	Persentase perizinan yang diterbitkan	Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun n / jumlah izin yang diajukan pada tahun n x 100 %	DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan)	Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	Metode standar perhitungan IKM	DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan)	SE Mendagri Nomor 500/1191/V/BA	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		perizinan			NGDA/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Standar Kompetensi.	
		Persentase Data dan Informasi perizinan dan nonperizinan yang ter-update	umlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terupdate / jumlah seluruh data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100 %	DPMPTSP (Pengendalian Penanaman Modal)		

XXVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas Membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

B. Fungsi

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- 2) pengendalian pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan;
- 3) penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 4) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 5) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
- 6) pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
- 7) pelaksanaan Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 9) pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) keberadaan kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- 10) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 11) pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
- 12) penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- 13) pengelolaan persampahan;
- 14) penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas;
- 15) pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan; dan
- 16) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase implementasi kebijakan lingkungan hidup	Jumlah Kebijakan LH yang sudah di <u>implementasikan</u> Jumlah Keseluruhan LH dikalikan 100%	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Kawasan konservasi air dan tanah di perkotaan	3 kawasan (Taman Hijriah, Taman Kehati, Taman Kehati/Hutan Kota Suak Nie)	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Persentase pemegang izin usaha yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup	umlah Pemegang izin usaha yang taat <u>terhadap aturan PPLH</u> Jumlah Pemegang izin usaha yang terdaftar dikalikan 100%	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kelompok yang terlibat dalam Pengelola Lingkungan: 1. Yayasan Paramadina semesta 2. LSM Gerakan Peduli Lingkungan 3. Bumo Endatu Ceudah	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kepedulian lingkungan hidup	Brp Sekolah yang peduli terhadap LH (4 sekolah)	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Persentase kasus yang diselesaikan	<u>umlah Kasus yg terselesaikan</u> Jumlah kasus yang dilaporkan ke DLH dikalikan 100%	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
		Persentase penanganan pencemaran lingkungan	Jumlah Pencemaran Lingkungan Yang <u>Ditangani</u> Jumlah Total Pencemaran Lingkungan Yang terjadi	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Total timbulan sampah perkotaan yang ditangani	Total Timbulan Sampah yang diangkut perhari x 30 hari x 12 bulan	Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 (RPD)		
2	Mencegah pencemaran dan kerusakan SDA LH	Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	<u>Luas Area Pelayanan Sampah Perkotaan</u> Luas Area Perkotaan Aceh Barat dikaliakn 100 %	Permendagri 86 tahun 2017		
		Persentase penanganan sampah	<u>Luas Area Perkotaan Aceh Barat</u> Jumlah Total Timbulan sampah di Kabupaten dikalikan 100%	Permendagri 86 tahun 2017		
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daurulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA ataudibuang ke lingkungan	Permendagri 86 tahun 2017		

XXIX. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

A. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas Melaksanakan Urusan pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian

B. Fungsi

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi public, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi public, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi public, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 4) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informasi public, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 5) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati.

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Akses Informasi Sektor Pemerintahan	Cakupan Layanan Telekomunikasi (persen)	Jumlah Layanan Telekomunikasi <u>tingkat Desa</u> Jumlah desa dalam Kabupaten Aceh Barat (dikali 100%)	Diskominsa	Agar semua desa di Kabupaten Aceh Barat terjangkau dengan layanan telekomunikasi	
		Prosentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPBE	<u>Jumlah OPD yang telah menerapkan SPBE</u> Jumlah OPD (dikali 100%)	Diskominsa	Setiap OPD Wajib Menerapkan SPBE	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terintegrasi ke portal satu data	Jumlah Data yang di Upload kedalam Portal Open Data Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Diskominsa	Informasi Data Statistik Sektoral	
3.	Meningkatkan Pengamanan Sistem Informasi Daerah	Persentase persandian terhadap informasi yang harus diamankan	Jumlah OPD yang telah diamankan informasi menggunakan Sertifikat <u>Elektronik dan email Sanapati</u> Jumlah OPD (dikali 100%)	Diskominsa	Pengamanan Informasi OPD menggunakan Sertifikat Elektronik dan email Sanapati Badan Siber dan Sandi Negara	
		Jumlah aparatur persandian yang disertifikasi oleh BSSN	Jumlah Aparatur Sandi yang telah tersertifikasi oleh BSSN	Diskominsa	Aparatur Sipil Negara Pemkab Aceh Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sandiman di Badan Siber dan Sandi Negara	

XXX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pengelolaan Keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;
- 5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 10) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- 14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Pelayanan Kependudukan	Rasio Penduduk ber E-KTP Per Satuan Penduduk	Jumlah Penduduk usia >17th dan atau telah menikah yang ber E-KTP : Jumlah penduduk usia >17th dan atau telah menikah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun dan atau telah menikah wajib memiliki KTP sebagai Identitas diri	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (dibagi)Jumlah penduduk wajib akta kelahiran (dikali) 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan	
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan (dibagi)Jumlah Kematian yang Terjadi di tahun berkenaan (dikali) 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Sebagai Dasar Update Database Kependudukan	
3.	Meningkatkan Kualitas Informasi dan Administrasi Kependudukan	Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan yang ter-update	Jumlah Penyusunan Laporan Agregat Semesteran (dibagi)Jumlah Target Penyusunan Laporan Agregat, Semesteran (dikali) 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Administrasi Kependudukan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Pemanfaatan Profil Data Kependudukan Untuk Pembangunan	Adanya Kerjasama Pemanfaatan Profil Data Kependudukan dengan OPD dan/ atau Mitra	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Pemanfaatan Data Kependudukan yang digunakan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan	

XXXI. DINAS PERTANAHAN

A. Tugas

Dinas Pertanahan mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

B. Fungsi

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- 4) Pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- 5) Pelaksanaan Penanganan masalah pertanahan;
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- 7) Pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- 8) Pembinaan UPTD;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dibidang pertanahan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Kepemilikan Tanah	Cakupan Tanah Milik Pemerintah yang Memiliki Hak Atas Tanah	Jumlah tanah pemerintah yang bersertifikat dibagi jumlah target tanah pemerintah yang akan di sertifikat dikali 100%	Tersediannya Dokumen Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah	Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan	
2	Penyelesaian Permasalahan, Sengketa dan Konflik Pertanahan	Persentase Kasus tanah yang diselesaikan	Jumlah sengketa yang di selesaikan di bagi dengan jumlah sengketa yg diterima dikali 100%	Fasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Dinas Pertanahan	
3	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi terhadap Kebutuhan dan Kepemilikan Tanah	Cakupan Informasi Nilai Tanah Yang dapat Diakses Masyarakat	Jumlah zona nilai tanah dalam satu kawasan dibagi jumlah zona yang akan di petakan dikali 100%	Menetapkan ZNT sebagai dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah	Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan	
		Cakupan Informasi Data Tanah Milik Pemerintah dalam SIMTANAH	Jumlah informasi Penggunaan tanah dibagi jumlah target data yang akan di inventarisasikan dikali 100%	Perbup No.69 Tahun 2022	Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan	
		Tingkat Akurasi Aset Milik Pemerintah	Jumlah bidang tanah pemerintah dibagi jumlah bidang yang sudah terpetakan dikali 100%	Survei dan Pengukuran Tanah Pemerintah	Dinas Pertanahan	

XXXII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

A. Tugas

Satpol PP dan WH mempunyai tugas melaksanakan penegakan qanun, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syariat islam.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan Peraturan Bupati;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kebijakan penegakan syariat islam;
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Qanun dan Peraturan Bupati; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mempertahankan Stabilitas Patroli dan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Qanun/Perbup Tentang Trantibum dan Qanun Syariat Islam	Persentase Penegakan Qanun/Perda	$\frac{\text{Jumlah Pelanggar Qanun}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Bidang WH Bidang Trantibum Bidang Hal dan Linmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002, 2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 3. Perbup Nomor 5 Tahun 2010 4. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 5. Qanun Nomor 3 Tahun 2021 6. Perbup Abar Nomor 10 Tahun 2023 	

XXXIII. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Tugas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

B. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukuna antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi intelijen daerah;
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesbangpol;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnyakehidupan sosial politik dan keagamaan yang harmoni	Cakupan Wilayah Pelaksanaan Pemilihan yang Aman dan Lancar	<u>Seluruh Wilayah Aceh Barat</u> Wilayah Pelaksanaan Pemilihan yang Aman dan Lancar dikali 100 %	Seksi Poldagri Kesbangpol Kab. Aceh Barat Memenuhi Undang-undang No. 10 Tahun Wilayah Pelaksanaan Pemilihan	Bankesbangpol Kab. Aceh Barat dan Lancar	
		Persentase unsur pemerintahan gampong yang mengikuti pembinaan nilai-nilai	<u>Seluruh Gampong Aceh Barat</u> gampong yang mengikuti pembinaan nilai-nilai Pancasila dikali 100%	Bankesbangpol Kab. Aceh Barat	Pemerintahan Gampong yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Pancasila	
		Jumlah koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif	Seberapa Banyak koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif	Seksi Poldagri Kesbangpol Kab. Aceh Barat	Pelaksanaan Koordinasi Tentang Proses Pencairan Anggaran Terhadap Kebutuhan Dana Pemilu dan Situasi dan Kondisi Menjelang Pemilu	
		Jumlah pelanggaran ringan selama pemilihan	Seberapa Pelanggaran ringan selama Pemilihan	Bankesbangpol Kab. Aceh Barat	Banyaknya Masyarakat yang Tidak Melakukan Pelanggaran Ringan	

XXXIV. SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN

A. Tugas

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi penyusunan program pengelolaan urusan umum, perlengkapan, karyawan/amil serta pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

B. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku;
- 2) Mengkoordinir tugas Kepala Sub Bagian dan Bendahara sesuai dengan kebijakan/petunjuk Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sejalan dengan Visi dan Misi Baitul Mal;
- 3) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Baitul Mal dan Kepala Sekretariat Baitul Mal untuk meningkatkan kinerja kelembagaan;
- 4) Membantu Kepala Baitul Mal dan Kepala Sekretariat Baitul Mal dalam bidang tugasnya;
- 5) Mengurus keperluan administrasi Baitul Mal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyusun rancangan anggaran tahunan pengelolaan harta agam dan zakat sesuai kebutuhan serta membuat laporan secara periodik;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah		Laporan keluhan Masyarakat		
		Hasil Evaluasi LAKIP		Laporan LAKIP		
2.	Tersalurnya Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya	Tersalurnya dana ZIS kepada Para Mustahiq		Lpj BMK		
		Persentase Mustahiq yang Tersantuni		Lpj BMK		
		Jumlah Penerimaan ZIS		Lpj BMK		

XXXV. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

A. Tugas

Sekretariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif lembaga MPD Kabupaten Aceh Barat

B. Fungsi

- 1) Penyusunan program Sekretariat MPD;
- 2) Pelaksanaan Fasilitas penyiapan program Sekretariat MPD;
- 3) Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis MPD;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat MPD;
- 5) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPD;
- 6) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPD;
- 7) Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MPD;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MPD;
- 10) Pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPD serta Bupati melalui Sekda.

C.Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menyusun kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan	Persentase SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat yang menerapkan muatan lokal (Pendidikan Pancasila)	Jumlah Sekolah yang menerapkan Muatan Lokal (<u>Pendidikan Pancasila</u>) Jumlah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Aceh Barat (dikali 100%)	Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh Kab. Aceh Barat dan Pearaturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Isi Muatan Lokal Aceh Pada Jenjang Pendidikan Dasar	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	
		Persentase SD yang menerapkan muatan lokal (Fiqih, Aqidah, Akhlak dan Tauhid)	Jumlah SD yang menerapkan Muatan Lokal (Fiqih, Aqidah, <u>Akhlak dan Tauhid</u>) Jumlah Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Barat (dikali 100%)			
		Persentase SMP yang menerapkan muatan lokal (Fiqih, Aqidah, Akhlak dan Tauhid)	Jumlah SMP yang menerapkan Muatan Lokal (Fiqih, Aqidah, <u>Akhlak dan Tauhid</u>) Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Barat(dikali 100%)			

XXXVI. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

A. Tugas

Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif lembaga MPU Kabupaten Aceh Barat.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan program Sekretariat MPU;
- 2) Pelaksanaan Fasilitas penyiapan program Sekretariat MPU;
- 3) Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis MPU;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat MPU;
- 5) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU;
- 6) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPU;
- 7) Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MPU;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MPU;
- 10) Pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU serta Bupati melalui Sekda.

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan pembinaan dan syiar Islam kepada seluruh lapisan masyarakat	Jumlah kader ulama yang dilatih	<u>Jumlah kader ulama yang telah dilatih</u> jumlah santri yang tersedia (dikali 100)	Sekretariat MPU	Kader Ulama yang dilatih berasal dari santri dayah/pondok pesantren di kecamatan	

XXXVII. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

A. Tugas

Sekretariat MAA mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif lembaga MAA Kabupaten Aceh Barat.

B. Fungsi

- 1) Penyusunan program Sekretariat MAA;
- 2) Pelaksanaan Fasilitas penyiapan program Sekretariat MAA;
- 3) Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat MAA;
- 5) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MAA;
- 6) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MAA;
- 7) Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MAA;
- 10) Pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MAA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA serta Bupati melalui Sekda.

C. Indikator Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat dalam masyarakat	Persentase Pembinaan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Barat	Jumlah Kecamatan yang melestarikan <u>Prosesi adat</u> Jumlah Seluruh Kecamatan yang ada di Aceh Barat (dikali 100)		Prosesi adat yang dilestarikan yaitu: Adat Seumapa, Adat Perkawinan, Adat Do daidi. Sementara itu masih ada prosesi adat lain yang sudah hilang dan perlu dilestarikan	
		Persentase Gampong yang telah menerapkan Hukum Adat	Jumlah Gampong yang aparaturnya telah <u>dilatih pelatihan Hukum adat</u> Jumlah seluruh Gampong di Aceh Barat (dikali 100)		Sampai Tahun 2022 masih ada 44 Gampong yang aparatur nya belum mengikuti Pelatihan Hukum Adat	

XXXVIII. KANTOR CAMAT JOHAN PAHLAWAN

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kasi Pelayanan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kasi Kesejahteraan Sosial	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kasi Ekonomi Pembangunan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XXXIX. KANTOR CAMAT KAWAY XVI

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Kaway XVI	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Kaway XVI	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Kaway XVI	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XL. KANTOR CAMAT WOYLA

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Woyla	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Woyla	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Woyla	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLI. KANTOR CAMAT BUBON

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Bubon	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Bubon	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Bubon	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLII. KANTOR CAMAT SAMATIGA

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Samatiga	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Samatiga	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Samatiga	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLIII. KANTOR CAMAT PANTON REU

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Panton Reu	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Panton Reu	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Panton Reu	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLIV. KANTOR CAMAT ARONGAN LAMBALEK

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Arongan Lambalek	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Arongan Lambalek	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Arongan Lambalek	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLV. KANTOR CAMAT WOYLA BARAT

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C.Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Woyla Barat	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Woyla Barat	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Woyla Barat	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLVI. KANTOR CAMAT WOYLA TIMUR

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat woyla Timur	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat woyla Timur	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat woyla Timur	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLVII. KANTOR CAMAT MEUREUBO

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Meureubo	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Meureubo	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Meureubo	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLVIII. KANTOR CAMAT PANTE CEUREUMEN

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir	Kantor Camat Pante Ceureumen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Pante Ceureumen	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Pante Ceureumen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

XLIX. KANTOR CAMAT SUNGAI MAS

A. Tugas

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong;
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Jumlah aspirasi masyarakat yang terakamodir	Kantor Camat Sungai Mas	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	
2	Meningkatnya Keluarga sejahtera	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Camat Sungai Mas	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992	
3.	Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan pelanggaran	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan pelanggaran	Jumlah aspirasi terakomodir dikali jumlah aspirasi dibagi 100%	Kantor Camat Sungai Mas	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	

Pj. BUPATI ACEH BARAT,



MAHDI